

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmada Suhelmi, 2010, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Anna Triningsih dan Oly Viana Agustine, 2019, *Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang –Undang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Fuad Fachruddin, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negar*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mohammad Mahrus Ali, 2019, *TAFSIR KONSTITUSI Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Mohammad Ryan Bakry, 2010, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Moh. Kusnardidan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Study Hukum Tata Negara FHUI.

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.

Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Persada.

Siswanto Sunarso, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

Suharizal, 2011, *PEMILUKADA Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta, Rajawali Pers.

Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta, Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aruran-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah yang BerhakMengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.

C. Jurnal

Bungasan Hutaper, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 4 Nomor 1, April 2015

Inong,, *Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pencalonan sebagai Kepala daerah*, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 Nomor 11. 2015

Kevin R. Komalig, “Hak Politik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017.

Novi Chasanatun Fadhillah , *Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pilukada, 2019*

Yulia Netta, *Partisipasi masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan, 2013, Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

<http://digilib.unila.ac.id/9265/15/BAB%2011.pdf>

<https://www.zonareformasi.com/ciri-ciri-ham/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.htm>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html>

<https://www.studinews.co.id/pengertian-asn-aparatur-sipil-negara-jabatan-hak-dan-kewajibannya/>

<https://andisaddam.wordpress.com/2018/06/23/asn-vs-pns-pilih-mana/>

<https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox?projector=1>

<https://www.jogloabang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11967/BAB%2011.pdf?sequence=4&isALLOWed=y>

<https://balikpapan.bawaslu.go.id/netralitas-dan-hak-politik-tni-polri-asn-dalam-pelaksanaan-pemilihan-kepala-daerah-tahun-2020>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/01/26/70/pemenuhan-hak-konstitusional-warga-negara-dalam-pilkada-serentak-2015.html>

